



## GAYA KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ni Wayan Rita Ardina Yanti<sup>1</sup> Ni Ketut Rasmini<sup>2</sup>

### Article history:

Submitted: 29 Mei 2024

Revised: 30 Juni 2024

Accepted: 8 Juli 2024

### Keywords:

Leadership Style;

Government's Internal Control System;

Utilization of information technology;

Quality of regional government financial reports;

### Abstract

*The increasing demand for accountability and transparency in regional finances along with the development of the public sector in Indonesia, requires the submission of quality financial reports. This research aims to examine the influence of leadership style, the government's internal control system, and the use of information technology on the quality of the Badung Regency regional government's financial reports. Research data was collected through questionnaires given to 80 financial employees of regional apparatus organizations in Badung Regency using purposive sampling techniques. Data analysis was carried out using the SEM-based PLS method using SmartPLS. The research results show that leadership style, the government's internal control system, and the use of information technology have a positive and significant influence on the quality of the Badung Regency regional government's financial reports. Theoretically, this research contributes to the implementation of agency theory and acceptance theory and the use of technology in regional financial management. Practically, the results of this research can be used as input and evaluation material for the Badung Regency Government or other regional governments regarding the factors that need to be considered to produce quality regional government financial reports that are able to meet the financial information needs of their users.*

### Kata Kunci:

Gaya Kepemimpinan;

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

### Abstrak

Meningkatnya tuntutan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan daerah seiring dengan berkembangnya sektor publik di Indonesia yang memerlukan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 80 pegawai keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan metode PLS berbasis SEM menggunakan SmartPLS. Temuan penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, SPIP, dan pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD Kabupaten Badung. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengimplementasian teori keagenan dan teori penerimaan serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Badung atau pemerintah daerah lainnya terkait faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi penggunanya.

### Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Udayana,

Denpasar, Bali, Indonesia

Email:

[ritaardinaa@gmail.com](mailto:ritaardinaa@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Peningkatan tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi dalam hal keuangan daerah sejalan dengan meningkatkan perkembangan sektor publik di Indonesia (Prastiwi & Mimba, 2018). Tuntutan tersebut mengacu pada penyajian laporan keuangan yang berkualitas, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu bersifat andal, relevan, mudah dipahami, dan mudah dibandingkan (Agung & Gayatri, 2018) (Anggadini *et al.*, 2023). Indikasi LKPD yang semakin berkualitas ditandai dengan perolehan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut merupakan salah satu poin penting dalam mengukur transparansi keuangan daerah yang wajar serta mengikuti peraturan keuangan yang berlaku (Fazlurahman *et al.*, 2021), akan tetapi pada tahun 2022 ditemukan pengungkapan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2018 oleh salah satu pemimpin pada Pemerintah Kabupaten Tabanan (BPK Perwakilan Provinsi Bali, 2022). Kasus tersebut menjadi sorotan publik karena korupsi yang sering terjadi selalu dikaitkan dengan laporan keuangan yang buruk atau manipulatif, namun di sisi lain LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan memperoleh Opini WTP selama lima tahun terakhir (BPK, 2022).

Teori keagenan merupakan *grand theory* penelitian ini yang menjelaskan mengenai pemerintah daerah bertindak sebagai agen & masyarakat sebagai prinsipal (Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Pemerintah daerah bertugas mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat, seperti pajak atau pendapatan lainnya. Tugas utama pemerintah sebagai agen adalah mengelola sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini seringkali terhambat oleh kepentingan antara agen dan prinsipal yang berbeda, sehingga menyebabkan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. UTAUT oleh Venkatesh *et al.* (2003) digunakan sebagai teori pendukung teori keagenan untuk menjelaskan pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD.

Teori keagenan mewajibkan pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) dengan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat, selain itu pemerintah daerah juga harus menghindari konflik kepentingan agar tidak merugikan masyarakat. Tanggung jawab pihak agen adalah membuat laporan keuangan yang berkualitas agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan oleh pemerintah (Minta & Juliarsa, 2023). Gaya kepemimpinan berperan dalam mendorong dan memotivasi bawahan atau karyawan untuk mencapai pelaporan keuangan yang memadai bagi masyarakat (Salia & Wibowo, 2022). Agung & Gayatri (2018) yang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan pada kualitas LKPD Kabupaten Karangasem menghasilkan temuan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipa *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional akan meningkatkan kualitas LKPD Provinsi Bali.

Lalu, penelitian Salia & Wibowo (2022) menyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh sumber daya manusia (SDM) pada kualitas LKPD eks Karesidenan Surakarta. Gaya kepemimpinan yang baik dapat memotivasi kinerja SDM atau karyawannya untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama penelitian ini, sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pihak agen harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai regulasi yang berlaku kepada pihak prinsipal berdasarkan ketentuan pada teori keagenan (Purba & Purba, 2023). Penerapan SPIP yang efektif diperlukan dalam peningkatan kualitas LKPD yang menjadi tanggung jawab agen kepada prinsipal (Fazlurahman *et al.*, 2021). PP No. 60 Tahun 2008 mengatur bahwa SPIP diterapkan secara menyeluruh di pemerintah daerah. Salah satu tujuan penerapan SPIP pada lingkungan pemerintah daerah berdasarkan peraturan tersebut adalah keandalan pelaporan keuangan. Keandalan laporan

keuangan mengacu pada tingkat kepercayaan dan akurasi informasi yang disajikan. Pelaporan keuangan yang andal menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai agen dapat dikatakan berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai prinsipal. Semakin andal laporan keuangan, maka akan semakin tinggi kualitas dari LKPD tersebut dan hal ini dipengaruhi oleh SPIP yang diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Minta & Juliarsa (2023) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Manggarai Barat; Sutrisna *et al.* (2022) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan; Rahmawati *et al.* (2022) pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Yogyakarta; Aswar (2020) pada Pemerintah Kota Banten; serta Agung & Gayatri (2018) pada SKPD Kabupaten Karangasem menghasilkan temuan bahwa SPIP berpengaruh positif pada kualitas LKPD. Penerapan SPIP yang efektif oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada kualitas LKPD yang semakin meningkat dengan penyediaan informasi yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai prinsipal. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua penelitian ini, sebagai berikut:

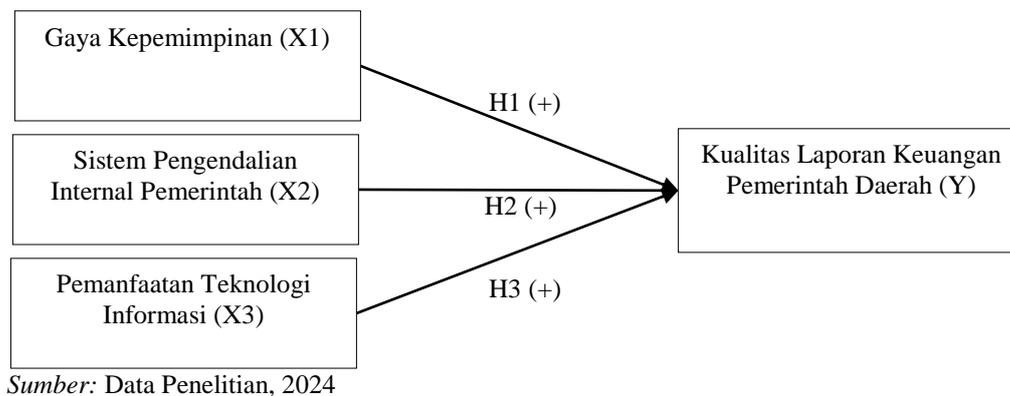
H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut teori keagenan, pemerintah daerah sebagai pihak agen harus mempertanggungjawabkan tugasnya secara melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang informasi finansial yang berkualitas dan pelaporan secara tepat waktu kepada pihak prinsipal (Purba & Purba, 2023). UTAUT menyoroti komponen apa saja yang mempengaruhi penerimaan TI dan pemanfaatannya dalam penyusunan LKPD. Harapan atas manfaat, kemudahan penggunaan, dukungan sosial atau organisasi, dan kondisi yang mendukung menjadi faktor penentu pemanfaatan TI dalam penyusunan LKPD. Sutrisna *et al.* (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan TI dapat meningkatkan kualitas LKPD. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Wibowo & Darmanto (2019), yaitu teknologi informasi khususnya komputer dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan keuangan, sehingga lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan TI dalam proses pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan, serta meminimalisir risiko kesalahan manusia (*human error*). Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Purba (2023) pada OPD Kabupaten Deli Serdang; Sutrisna *et al.* (2022) pada SKPK Aceh Selatan; Dewi & Hoesada (2020) pada SKPD Jakarta Barat; Wibowo & Darmanto (2019) pada SKPD Jawa Tengah; serta Agung & Gayatri (2018) pada SKPD Kabupaten Karangasem menghasilkan temuan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini, sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Minta & Juliarsa (2023). Peneliti tertarik untuk mengkaji ulang pengaruh SPIP dan pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD dengan mengganti variabel kompetensi SDM dengan gaya kepemimpinan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan fenomena terbaru yang terjadi di lokasi berbeda. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki pendapatan tertinggi di Provinsi Bali, sehingga memiliki tuntutan pertanggungjawaban yang lebih kompleks terkait pengelolaan keuangannya. Fenomena penelitian ini terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, namun penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tersebut apabila dilakukan pada lokasi yang pernah mengalami kasus korupsi terdapat kemungkinan terjadinya bias *non-response* yang dapat menyebabkan hasil penelitian kurang representatif secara keseluruhan. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan alat analisis SPSS, sedangkan alat analisis data yang diganti menggunakan SmartPLS karena dinilai dapat menguji variabel laten dengan lebih baik, bahkan pada jumlah sampel yang terbatas (Amalia Permata, 2023).

Pada penelitian kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ini, kerangka konseptualnya dijabarkan sebagai berikut.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung yang bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung (Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali); serta OPD di luar Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang berbentuk dinas dan badan, yaitu Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Jl. Kebo Iwa No.39, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Jl. Kunti II No.99x, Seminyak, Kuta, Badung, Bali). Populasi pada penelitian ini adalah pegawai keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung yang terdiri dari sekretariat, inspektur, dinas, badan, dan kecamatan dalam 36 OPD yang berjumlah 390 pegawai. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Badung yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sampel ditentukan dengan kriteria, yaitu 1) pegawai yang bertugas di bagian keuangan pada OPD yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan OPD di luar Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang berbentuk dinas atau badan; serta 2) pegawai OPD Kabupaten Badung dengan jabatan sebagai kepala sub bagian keuangan, bendahara, dan pegawai bagian keuangan dengan masa kerja minimal dua tahun dalam penyusunan laporan keuangan. Kuesioner dengan skala *likert* lima poin digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Proses penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Sebelum pengujian analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian pada instrumen penelitian melalui pelaksanaan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan *software SmartPLS*.

Tahapan analisis data menggunakan PLS pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji *outer* dan *inner model*. *Outer model* dilakukan untuk melihat nilai validitas dan reliabilitas dalam suatu model penelitian, sedangkan *inner model* digunakan untuk menguji hipotesisi dalam melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di 30 OPD Kabupaten Badung, yaitu 28 OPD berlokasi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan dua OPD di luar Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Responden dalam penelitian dibagi berdasarkan karakteristik yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Usia	<50 tahun	48	60
		>50 tahun	32	40
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	24	30
		Perempuan	56	70
3	Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan	28	35
		Bendahara	24	30
		Pegawai Bidang Keuangan	28	35
4	Lama Menjabat pada Jabatan Saat ini	2-5 tahun	43	53.75
		>5 tahun	37	46.25

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Instrumen penelitian diuji dengan jawaban dari 30 responden (*dummy*) dengan menggunakan SPSS versi 25 untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Hasilnya menunjukkan bahwa semua instrumen terbukti valid serta reliabel, sehingga kemudian disebarluaskan kepada responden target melalui metode *purposive sampling*. Validitas instrumen penelitian dianggap terpenuhi jika koefisien korelasi  $r$  hitung  $> 0.349$  untuk 30 responden pada tingkat signifikansi 5 persen, dengan nilai *pearson correlation* yang lebih besar dari 0.30 (Budiastuti & Bandur, 2018). Hasil uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini dirangkum pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Keterangan	
Gaya Kepemimpinan (X <sub>1</sub> )	GP1	Hubungan antara Pemimpin dengan Bawahan	0.898	Valid
	GP2	Cara mengambil keputusan	0.919	Valid
	GP3	Cara pandang	0.874	Valid
	GP4	Mengkomunikasikan tujuan	0.898	Valid
	GP5	Memberikan penghargaan	0.882	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>2</sub> )	SPIP1	Lingkungan pengendalian	0.928	Valid
	SPIP2	Pemantauan	0.977	Valid
	SPIP3	Penilaian risiko	0.951	Valid
	SPIP4	Kegiatan pengendalian	0.958	Valid
	SPIP5	Informasi dan Komunikasi	0.916	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	PTI1	Hardware	0.904	Valid
	PTI2	Software	0.931	Valid
	PTI3	Brainware	0.938	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	KLKPD1	Relevan	0.964	Valid
	KLKPD2	Andal	0.982	Valid
	KLKPD3	Dapat dibandingkan	0.940	Valid
	KLKPD4	Dapat dipahami	0.936	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki nilai koefisien korelasi  $r$  hitung lebih besar dari 0.349 dan nilai *pearson correlation* lebih besar dari 0.30, sehingga setiap instrumen dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

*Cronbach's alpha* digunakan untuk menilai reliabilitas instrumen. Apabila *cronbach's alpha* > 0.70, maka instrumen dianggap reliabel sesuai dengan studi oleh Budiastuti & Bandur (2018). Hasil uji reliabilitas instrumen dijabarkan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Gaya Kepemimpinan ( $X_1$ )	0.858	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ )	0.753	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ )	0.800	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.795	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen pada Tabel 3, seluruh koefisien *cronbach's alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0.70, sehingga seluruh instrumen dianggap reliabel atau memiliki keandalan dan konsistensi dalam mengukur variabel penelitian.

*Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* yang diestimasi dengan *Software PLS*, pada penelitian ini *loading factor* menggunakan kriteria 0.70. Hasil uji *outer loadings* disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Outer Loadings**

	Gaya Kepemimpinan ( $X_1$ )	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ )	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ )
GP1	0.898			
GP2	0.943			
GP3	0.900			
GP4	0.887			
GP5	0.882			
KLKPD1		0.889		
KLKPD2		0.941		
KLKPD3		0.919		
KLKPD4		0.967		
PTI1			0.938	
PTI2			0.941	
PTI3			0.946	
SPIP1				0.866
SPIP2				0.918
SPIP3				0.939
SPIP4				0.899
SPIP5				0.912

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* > 0.70, sehingga dikatakan indikator tersebut valid, sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang dieliminasi dari model.

Validitas juga dapat dinilai dengan membandingkan nilai AVE dari setiap konstruk. Nilai AVE > 0.50 merupakan kriteria suatu konstruk dianggap valid. Pada Tabel 5 akan disajikan nilai *composite reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.

**Tabel 5.**  
*Composite Reliability Variable*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Gaya Kepemimpinan (X <sub>1</sub> )	0.943	0.944	0.956	0.814
Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y)	0.947	0.950	0.962	0.864
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	0.936	0.939	0.959	0.887
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>2</sub> )	0.946	0.948	0.959	0.823

*Sumber:* Data Primer Diolah, 2024

Dalam Tabel 5, nilai *composite reliability* > 0.70 yang artinya semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selain itu, nilai AVE > 0.50 artinya model ini akurat dan konsisten mengukur variabel laten.

Uji validitas juga dapat dilakukan evaluasi nilai *cross-loading*. Pada pengujian ini, korelasi antara indikator harus memiliki nilai yang lebih tinggi dengan konstruk yang sama daripada dengan konstruk lainnya. Hasil pengujian discriminant validity disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6.**  
*Hasil Pengujian Discriminant Validity*

	<b>Gaya Kepemimpinan (X<sub>1</sub>)</b>	<b>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>3</sub>)</b>	<b>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X<sub>2</sub>)</b>
GP1	<b>0.898</b>	0.780	0.625	0.709
GP2	<b>0.943</b>	0.768	0.598	0.695
GP3	<b>0.900</b>	0.744	0.580	0.630
GP4	<b>0.887</b>	0.738	0.563	0.625
GP5	<b>0.882</b>	0.701	0.535	0.725
KLKPD1	0.766	<b>0.889</b>	0.720	0.682
KLKPD2	0.784	<b>0.941</b>	0.757	0.789
KLKPD3	0.729	<b>0.919</b>	0.742	0.686
KLKPD4	0.799	<b>0.967</b>	0.816	0.751
PTI1	0.579	0.728	<b>0.938</b>	0.560
PTI2	0.553	0.773	<b>0.941</b>	0.516
PTI3	0.683	0.805	<b>0.946</b>	0.635
SPIP1	0.659	0.649	0.536	<b>0.866</b>
SPIP2	0.693	0.732	0.550	<b>0.918</b>
SPIP3	0.709	0.732	0.547	<b>0.939</b>
SPIP4	0.650	0.710	0.587	<b>0.899</b>
SPIP5	0.690	0.725	0.535	<b>0.912</b>

*Sumber:* Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian *discriminant validity* setelah modifikasi model pada Tabel 6 yang menunjukkan bahwa semua konstruk dapat dinyatakan valid serta memiliki *discriminant validity* yang

baik karena seluruh indikator memiliki nilai *cross loading* terhadap konstruksya > nilai *cross loading* terhadap konstruk lainnya.

Uji validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat Akar AVE ( $\sqrt{\text{AVE}}$ ). Persyaratan indikator dikatakan valid diskriminan jika nilai Akar AVE) setiap variabel > nilai korelasi antara variabel laten. Hasil uji *Fornell-Larcker Criterion* disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7.**  
*Fornell-Larcker Criterion*

	Gaya Kepemimpinan (X <sub>1</sub> )	Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>2</sub> )
Gaya Kepemimpinan (X <sub>1</sub> )	0.902			
Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y)	0.828	0.930		
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	0.644	0.817	0.942	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>2</sub> )	0.750	0.783	0.607	0.907

*Sumber:* Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7, maka semua akar dari AVE (*Fornell-Larcker Criterion*) tiap konstruk lebih besar dari pada korelasinya dengan variabel lainnya. Semua variabel laten pada penelitian ini nilai Akar AVE > Korelasinya dengan konstruk lainnya, maka syarat validitas diskriminan pada model ini telah terpenuhi.

Validitas diskriminan dapat dilihat melalui rasio *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) dengan syarat nilai rasio HTMT harus lebih kecil dari 0.90 (HTMT < 0.90). Hasil uji HTMT disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8.**  
*Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*

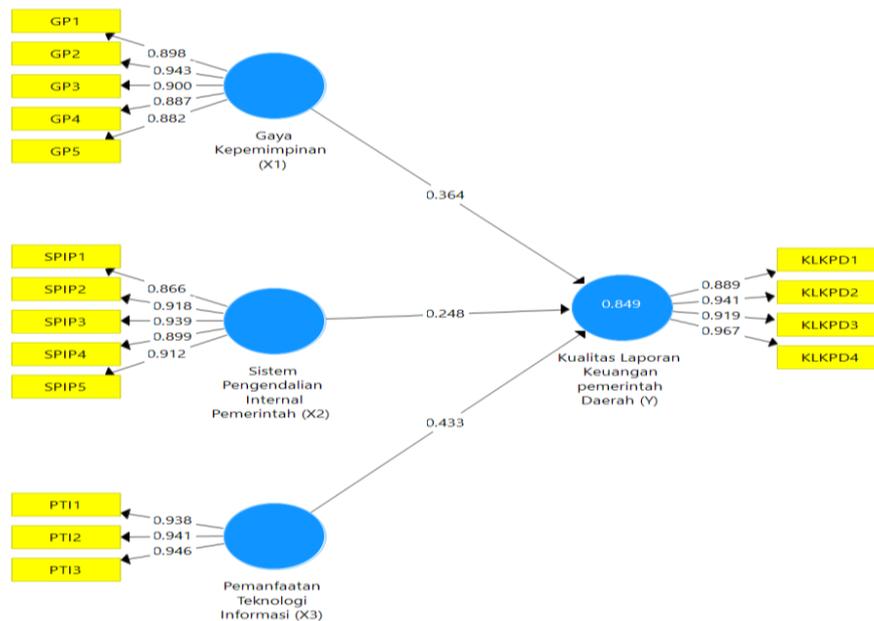
	Gaya Kepemimpinan (X <sub>1</sub> )	Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>2</sub> )
Gaya Kepemimpinan (X <sub>1</sub> )				
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.875			
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	0.683	0.866		
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>2</sub> )	0.795	0.825	0.644	

*Sumber:* Data Primer Diolah, 2024

Validitas diskriminan antara dua konstruk reflektif dapat dilakukan melalui perolehan nilai HTMT < 0.90 (Henseler *et al.*, 2015). Semua konstruk telah valid secara validitas diskriminan berdasarkan perhitungan HTMT yang disajikan pada Tabel 9 karena semua nilai HTMT < 0.90.

Penilaian terhadap uji reliabilitas adalah nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0.70 (Hair, dkk., 2011; Ghozali, 2014) pada (Hamid & Anwar, 2022). Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk menguji reliabilitas, disajikan pada Tabel 5. Semua variabel dikatakan reliabel karena semua nilai AVE > 0.50 dan semua nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) > 0.70.

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan dengan mengevaluasi nilai *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Uji *inner model* dilakukan dengan melihat koefisien *path*, koefisien determinasi ( $R^2$ ), *effect size* ( $F^2$ ), *predictive relevance* ( $Q^2$ ), dan *Goodness of Fit* (GoF) yang dianalisis menggunakan *software* SmartPLS. Adapun model struktural pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

**Gambar 2. Model Struktural**

Nilai koefisien *path* menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh suatu variabel laten dengan variabel laten lainnya yang diperoleh melalui metode *bootstrapping*. Skor *path coefficient* ditunjukkan oleh nilai T-statistik. Untuk pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi lima persen, nilai T-statistik harus lebih besar dari 1,96 (Ghozali, 2021: 76). Hasil uji *path coefficient* disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 9.**  
**Path Coefficient**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
Gaya Kepemimpinan (X1) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.364	0.366	0.109	3.345	0.001
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.433	0.428	0.075	5.776	0.000
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.248	0.247	0.103	2.411	0.016

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Tabel 9 menunjukkan  $X_1$  pada  $Y$  berpengaruh signifikan dengan *p-value* 0.001, nilai *original sample estimate* sebesar 0.364 artinya gaya kepemimpinan memiliki arah pengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu,  $H_1$  diterima. Selain itu,  $X_2$  pada  $Y$  berpengaruh signifikan dengan *p-value* 0.016, nilai *original sample estimate* 0.248 artinya pengaruh SPIP pada kualitas LKPD adalah positif. Dengan demikian,  $H_2$  diterima. Tabel 9 juga menunjukkan  $X_3$  pada  $Y$  berpengaruh signifikan

dengan *p-value* 0.000, nilai *original sample estimate* 0.43 artinya arah pemanfaatan TI memiliki arah pengaruh positif terhadap Y. Dengan demikian,  $H_3$  diterima.

Pengukuran *R-Square* memiliki tiga kategori dalam pengukurannya, yaitu 0.75 kategori kuat; 0.50 kategori moderat, dan 0.25 kategori lemah (Hair, dkk.: 2011) dalam (Hamid & Anwar, 2022). Tabel 10 merupakan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan SmartPLS.

**Tabel 10.**  
**Nilai *R-Square***

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.849	0.843

*Sumber:* Data Primer Diolah, 2024

Nilai *R-square* untuk variabel Kualitas LKPD (Y) diperoleh sebesar 0.849 dengan nilai *Adjusted R-Square* 0.843 dan termasuk dalam kategori yang kuat. Hasil ini menunjukkan 84.3% variabel Kualitas LKPD (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan ( $X_1$ ), SPIP ( $X_2$ ) dan pemanfaatan TI ( $X_3$ ).

Pengujian lain yang perlu dilakukan adalah uji untuk menilai besarnya pengaruh antar variabel dengan *effect size* atau *F-square*. Nilai *F-square* sebesar 0.02, 0.15, dan 0.35 termasuk kecil, moderat, dan besar (Ghozali, 2021:75). Nilai *F-square* pada penelitian ini disajikan pada Tabel 11.

**Tabel 11.**  
**Nilai *F-Square***

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Ket.
Gaya Kepemimpinan ( $X_1$ )	0.333	Moderat
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ )	0.167	Moderat
Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ )	0.681	Besar

*Sumber:* Data Primer Diolah, 2024

Pada Tabel 11, variabel  $X_1$  dan  $X_2$  menunjukkan *effect size* moderat dengan nilai *F-Square* masing-masing 0.333 dan 0.167. Ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan dan SPIP memiliki pengaruh moderat terhadap kualitas LKPD dalam model struktural. Sedangkan, pemanfaatan TI memiliki *effect size* besar dengan nilai *F-Square* 0.681, menunjukkan pemanfaatan TI memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas LKPD dalam model struktural.

Secara keseluruhan, validasi *inner model* menggunakan *Goodness of Fit* (GoF). Nilai GoF berkisar dari 0 hingga 1 dengan interpretasinya, yaitu 0.1 (GoF kecil), 0.25 (GoF moderat), dan 0.36 (GoF besar) (Haryono, 2016).

$$\begin{aligned} \text{GoF} &= \sqrt{\text{AVE} \times R^2} \\ \text{GoF} &= \sqrt{0.847 \times 0.849} \\ \text{GoF} &= 0.848 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \text{AVE} &= (0.814+0.864+0.887+0.823)/4 = 0.847 \\ \text{R square} &= 0.849 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan GoF menunjukkan nilai 0.676. Menurut (Haryono, 2016), nilai 0.1 (GoF kecil), 0.25 (GoF moderat), dan 0.36 (GoF besar). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner*

*model*) secara keseluruhan adalah termasuk besar karena nilai *Goodness of Fit Index* (GoF) lebih dari 0.36 (skala besar GoF).

Pengujian lain dalam *inner model* adalah *Q-square* ( $Q^2$ ) yang berfungsi untuk memvalidasi model. Hasil *Q-square* dikatakan baik jika nilainya  $>$  yang menunjukkan variabel laten independen baik (sesuai) sebagai variabel penjelas yang mampu memprediksi variabel dependennya. Nilai *Q-square* disajikan pada Tabel 12.

**Tabel 12.**  
**Nilai *Q-Square***

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Gaya Kepemimpinan ( $X_1$ )	400.000	400.000	
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	320.000	88.707	0.723
Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ )	240.000	240.000	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ )	400.000	400.000	

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 12, nilai *Q Square* pada konstruk Y  $>$  0.05, sehingga dapat diartikan prediksi terhadap konstruk Y sudah tepat atau relevan. Secara detail dapat disimpulkan bahwa relevansi prediksi gaya pemimpin, SPIP, dan pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD berdasarkan nilai *Q Square* sebesar  $0.723 >$  0.05, maka terima  $H_0$ . Disimpulkan bahwa variabel gaya pemimpin, SPIP, dan pemanfaatan TI telah tepat atau relevan jika digunakan sebagai prediktor terhadap konstruk kualitas LKPD sebagai variabel dependen.

Pengujian  $H_1$  menunjukkan hasil bahwa pengaruh gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) terhadap kualitas LKPD (Y) berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan berdampak secara langsung dan positif pada kualitas LKPD Kabupaten Badung, semakin baik cara dari seorang pemimpin dalam memimpin pegawainya, maka kualitas LKPD Kabupaten Badung akan semakin meningkat. Berdasarkan teori keagenan, pihak agen (pemerintah daerah) diharapkan memenuhi kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan mengikuti standar keuangan yang berlaku karena pihak prinsipal (masyarakat) mengharapkan suatu pertanggungjawaban yang berkualitas dari pihak agen, yaitu berupa laporan keuangan (Purba & Purba, 2023). Adanya gaya kepemimpinan yang transformasional dapat memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawannya dengan baik (Afifah, 2019). Gaya kepemimpinan yang baik dan dalam hal ini gaya kepemimpinan transformasional, memotivasi bawahannya (pihak agen) untuk bertanggung jawab secara penuh atas kualitas informasi yang disediakan dengan menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui gaya kepemimpinan yang baik, pemerintah daerah dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai prinsipalnya dalam memberikan informasi yang tidak menyesatkan melalui laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil studi Agung & Gayatri (2018) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki dampak positif pada kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. Temuan Pradipa *et al.* (2016) juga mendukung bahwa gaya kepemimpinan yang transformasional berpotensi meningkatkan kualitas LKPD Provinsi Bali. Penelitian oleh Salia & Wibowo (2022) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh SDM pada kualitas LKPD eks Karesidenan Surakarta.

Hasil pengujian  $H_2$  menunjukkan bahwa pengaruh SPIP ( $X_2$ ) pada kualitas LKPD (Y) adalah positif dan signifikan, semakin baik penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, maka kualitas LKPD akan semakin meningkat. Menurut teori keagenan, pihak agen harus melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien agar dapat mempertanggungjawabkannya sesuai regulasi yang berlaku kepada pihak prinsipal (Purba & Purba, 2023). Dalam hal ini, SPIP memiliki peranan untuk memastikan bahwa pihak agen dapat melaksanakan tugasnya sesuai regulasi

serta dengan keandalan yang tinggi. Apabila SPIP diterapkan secara memadai dan efektif pada pemerintah daerah, maka tingkat risiko audit yang ditetapkan dapat berkurang pada saat diaudit oleh BPK dan pengujian substantif oleh auditor akan terfokus karena mencerminkan ketaatan pada peraturan yang berlaku (Pradipa *et al.*, 2016). Keberadaan SPIP yang kuat akan meningkatkan kemampuan pihak agen dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik dan memenuhi harapan prinsipal, selain itu dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai agennya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Minta & Juliarsa (2023) pada SKPD Kabupaten Manggarai Barat; Sutrisna *et al.* (2022) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan; Rahmawati *et al.* (2022) pada OPD Kota Yogyakarta; Aswar (2020) pada Pemerintah Kota Banten; serta Agung & Gayatri (2018) pada SKPD Kabupaten Karangasem yang menghasilkan temuan bahwa SPIP berpengaruh positif pada kualitas LKPD.

Pengujian  $H_3$ , menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan TI ( $X_3$ ) pada kualitas LKPD ( $Y$ ) adalah positif dan signifikan. Pernyataan tersebut mengindikasikan semakin baiknya kualitas informasi yang dimanfaatkan, maka kualitas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Badung akan semakin meningkat. UTAUT menyoroti faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan dan pemanfaatan TI dalam penyusunan LKPD. Wibowo & Darmanto (2019) menyatakan TI khususnya komputer dapat menjadi pendukung penyusunan keuangan, sehingga lebih efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan TI, proses penyusunan LKPD dapat ditingkatkan, misalnya dengan otomatisasi dan akurasi yang lebih akurat, sehingga menghasilkan efisiensi dan meningkatkan kualitas LKPD. Selain itu, TI juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan yang relevan. Dengan demikian, harapan atas manfaat, kemudahan penggunaan, dukungan sosial atau organisasi, dan kondisi yang mendukung menjadi faktor penentu pemanfaatan TI dalam penyusunan LKPD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purba & Purba (2023) pada OPD Kabupaten Deli Serdang; Sutrisna *et al.* (2022) pada SKPK Aceh Selatan; Dewi & Hoesada (2020) pada SKPD Jakarta Barat; Wibowo & Darmanto (2019) pada SKPD Jawa Tengah; serta Agung & Gayatri (2018) pada SKPD Kabupaten Karangasem menghasilkan temuan bahwa TI memberikan dampak yang positif bagi kualitas LKPD.

## SIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, SPIP, serta pemanfaatan TI memiliki pengaruh langsung dan positif pada kualitas LKPD. Semakin baik cara dari seorang pemimpin dalam memimpin pegawainya dan semakin baik penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, serta apabila teknologi yang dimanfaatkan semakin baik, maka LKPD Kabupaten Badung akan semakin berkualitas. Berdasarkan hasil analisis deskripsi responden, indikator yang dinilai paling rendah pengaruhnya pada Kualitas LKPD adalah indikator cara pandang ( $X_1$ ), lingkungan pengendalian ( $X_2$ ), dan *brainware* ( $X_3$ ).

Cara pandang pemimpin ( $X_1$ ) pada penelitian ini dinilai melalui caranya dalam memberikan arahan dalam pemberian tanggung jawab kepada bawahannya, sebaiknya para pemimpin lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada bawahannya. Pada  $X_2$ , lingkungan pengendalian dinilai melalui aturan yang berlaku, penilaian kualitas pengendalian internal, tindakan atas pelanggaran, dan pemeriksaan pada catatan akuntansi, fisik kas, dan barang. Peningkatan lingkungan pengendalian, sebaiknya memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan indikator lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Pada  $X_3$ , *brainware* mengacu pada faktor sumber daya manusia dalam pemanfaatan TI. Para karyawan sebaiknya diberikan pelatihan yang disesuaikan pada masing-masing karyawan agar TI dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Badung. Pada penelitian ini, 84.3% dari

variabel yang diteliti dapat dijelaskan oleh variabel independennya, peneliti selanjutnya bisa menguji kembali variabel-variabel pada penelitian ini menggunakan objek atau pengukuran yang berbeda, selain itu dapat mempertimbangkan memasukkan variabel tambahan, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta kompetensi SDM sebagai variabel independen dan menjadikan variabel SPIP sebagai moderasinya.

## REFERENSI

- Afifah, R. A. (2019). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi sumber daya manusia dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). In *Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 1253. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17>
- Amalia Permata, R. (2023). *Analisis Data Penelitian Kesehatan: Perbandingan Hasil antara SmartPLS, R dan IBM SPSS Health Research Data Analysis: Comparison of Results between SmartPLS, R and IBM SPSS. I(1)*, 17–22.
- Anggadini, S. D., Yahya, A. S., Saepudin, A., Surtikanti, S., Damayanti, S., & Kasim, E. S. (2023). Quality of Indonesia Government Financial Statements. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 10(1), 93–103.
- Aswar, K. (2020). Assessing the impact of influencing factors on the quality of local government financial statements. *Pressacademia*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2020.1176>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. (2022). *Rp 31 Triliun, Realisasi PAD Badung Tahun 2022, PHR Penyumbang Pendapatan Terbesar*. 1. <https://bapenda.badungkab.go.id/berita/47049-rp-3-1-triliun-realisasi-pad-badung-2022-phr-penyumbang-pendapatan-terbesar>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. (2023). *1, 5 Bulan, Pendapatan Pajak Rp 483 Miliar*. 2022–2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah), 2020-2022*.
- BPK. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2009*.
- BPK Perwakilan Provinsi Bali. (2022, April). *KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka Korupsi DID 2018*. 1, 23–24. <https://bali.bpk.go.id/?p=16505>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 77–105. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/132>
- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(1), 4–10. [www.ijiras.com](http://www.ijiras.com)
- Fazlurahman, F., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penatausahaan Aset Tetap sebagai variabel Intervening (Studi pada BPKAD Kota Bandung). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 250–265. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1941.250-265>
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2022). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian (Konsep Dasar dan Aplikasi Program Smart PLS 3.2.8 Dalam Riset Bisnis)*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS* (H. Mintardja (ed.)). Badan Penerbit PT. Intermedia Personalia Utama.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Isadora, J. I. M., & Juliarsa, G. (2023). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan*. <http://kupang.bpk.go.id>
- Karsana, I. W., & Suaryana, Ig. (2017). Pengaruh Efektifitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 643–670.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi

- Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Minta, J. I. I., & Juliarsa, G. (2023). Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 33(8), 2201–2213. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i08.p17>
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. (n.d.). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 282.
- Pradipa, N. A., Putri, I. A. D., & Ratnadi, N. M. D. (2016). Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Hubungan Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Provinsi Bali). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 2695–2722.
- Prastiwi, N. P. J., & Mimba, N. P. S. H. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(02), 1178. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p14>
- Purba, S., & Purba, R. (2023). Determinasi Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15264>
- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 330–343. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Salia, F. N., & Wibowo, P. (2022). Ada Apa dengan Faktor Kepemimpinan dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta? 8(1), 63–88.
- Samosir, M., & Setiyawati, H. (2019). The Effect of Competence of Human Resources, Application Internal Control System, Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Statements (Survey on Regional Work Unit of Cianjur Regency Government). In *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) ISSN*. [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org)
- Setiyadi, I. N., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Sistem Informasi Akuntansi Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1953–1980.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. . (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*, 4(71), 1–25.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*.
- Sutrisna, M., Nadirsyah, N., & Indayani, I. (2022). The Effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, and Application of Government Accounting Standards on The Quality of Financial Reporting (Study on South Aceh Government SKPK). *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(3), 124–134. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v3i3.311>
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 768. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p29>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2016.03.015>
- Wibowo, A., & Darmanto, S. (2019). Improvement Quality of Financial Report Model by Good Governance, Utilization of Information Technology and Internal Control. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 10(4), 9–17. <https://doi.org/10.9790/5933-1004020917>